BELUM ADA LAPORAN MASUK, OMBUDSMAN ACEH JELASKAN KEWENANGAN DALAM ISU PPPK BPS ACEH TIMUR

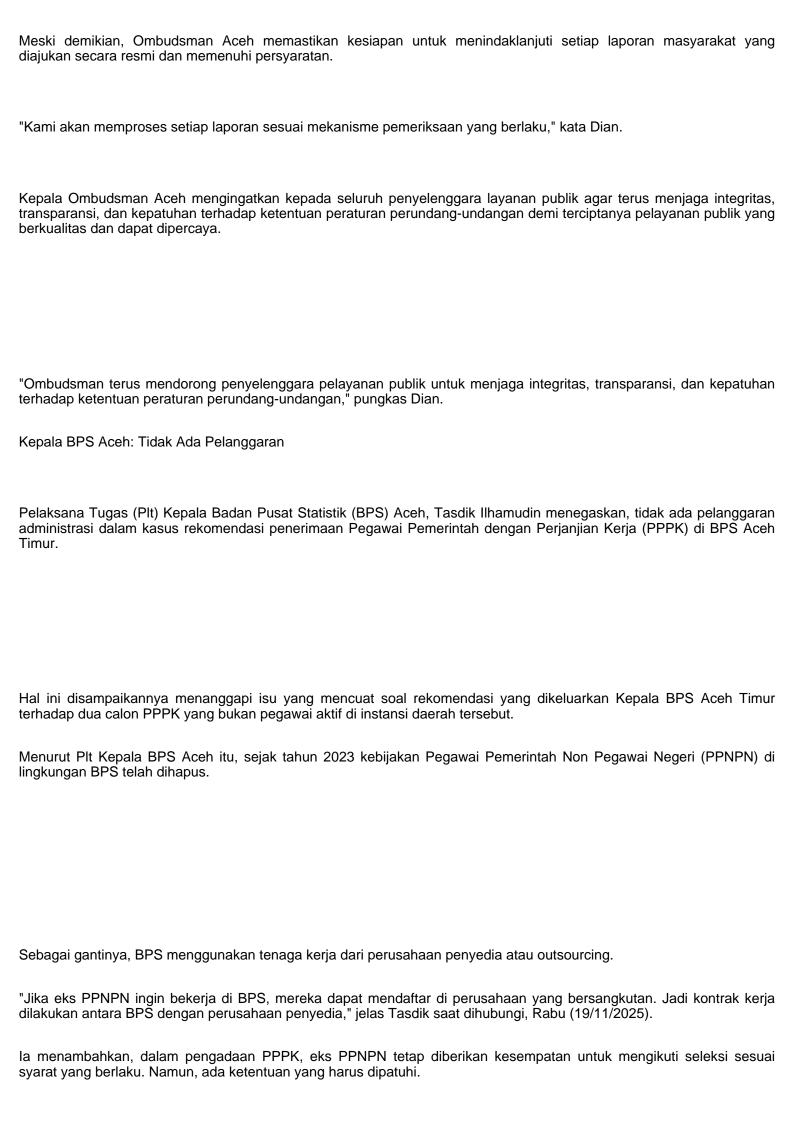
PPPK BPS ACEH TIMUR
Selasa, 25 November 2025 - aceh
SERAMBINES.COM, BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh angkat bicara terkait isu dugaan ketidaksesuaian administrasi dalam proses penerbitan rekomendasi PPPK di Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Timur.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty SE Ak MPA, menegaskan bahwa hingga Senin (24/11/2025), pihaknya belum menerima satu pun Laporan Masyarakat (LM) terkait isu tersebut.
"Ombudsman belum menerima Laporan Masyarakat terkait informasi tersebut. Namun, Ombudsman perlu menegaskan batas kewenangan dalam menilai dugaan maladministrasi," ujarnya saat dimintai keterangan oleh Serambinews.com, Selasa (25/11/2025).
Dian menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, lembaganya hanya dapat menyimpulkan ada atau tidaknya maladministrasi setelah melalui serangkaian mekanisme pemeriksaan.
"Sampai saat ini belum ada laporan masyarakat yang masuk, sehingga Ombudsman belum dapat melakukan penilaian
apa pun atas dugaan maladministrasi yang diberitakan," ujarnya.
la juga menekankan bahwa regulasi dan validasi terhadap persyaratan PPPK sepenuhnya berada di bawah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

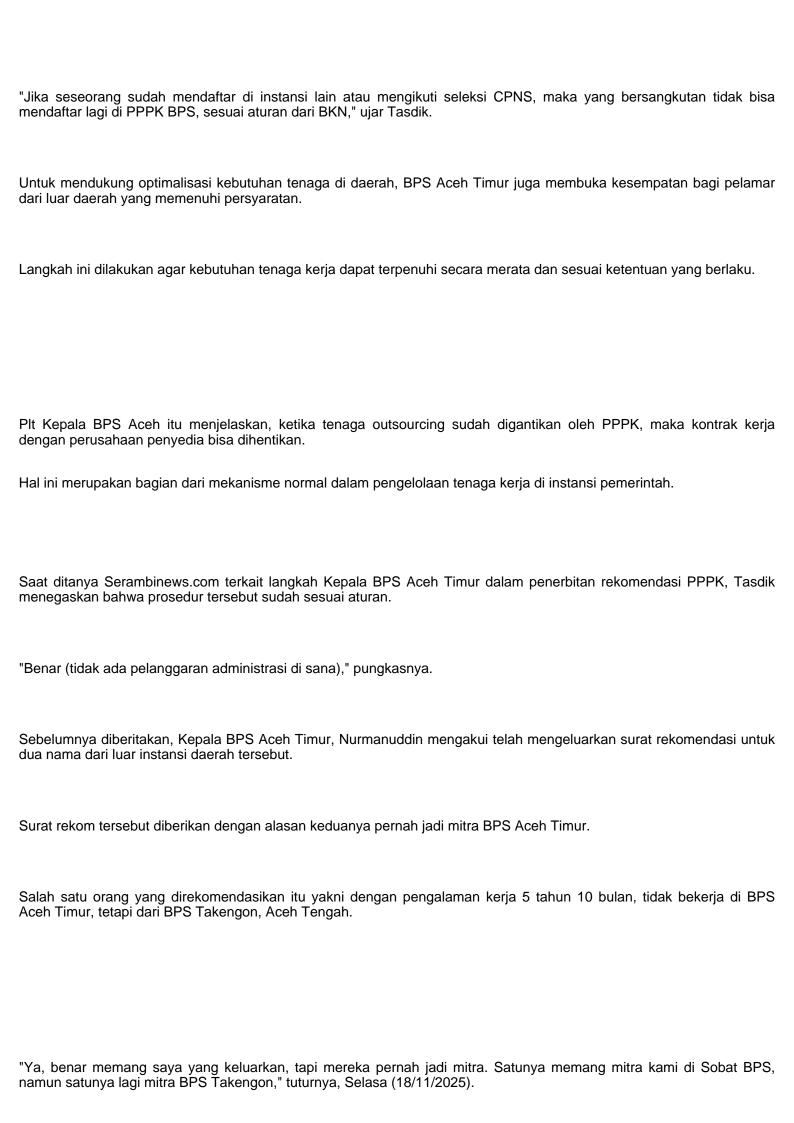
Sementara itu, jika terdapat dugaan ketidaktepatan dalam penerbitan rekomendasi di lingkungan BPS, hal tersebut merupakan ranah pengawasan internal instansi, khususnya Inspektorat BPS, yang berwenang menilai kepatuhan

"Aspek tersebut masuk dalam ranah pengawasan internal BPS yang memiliki kewenangan menilai kepatuhan

administrasi serta etika pegawai.

administrasi dan etika pegawai," papar Dian.





Saat ditanya kenapa harus mengeluarkan surat rekomendasi atas nama BPS Aceh Timur jika yang bersangkutan bekerja di BPS Aceh Tengah, Nurmanuddin menjawab hal ini ia lakukan untuk mengisi kekosongan di kantornya yang tidak bisa diisi oleh pekerja sebelumnya.
"Itu PPPK dibuka, sementara dua pekerja kami tidak bisa mendaftar karena sudah ikut CPNS. Ya meskipun keduanya tidak lolos, karena kami mengetahui ke depan belum ada lagi PPPK, maka kita cari orang lain," jelas Nurmanuddin.
"Tapi meskipun begitu, saya mengeluarkan rekomendasi itu atas dasar surat dari BPS Aceh Tengah, jadi agar dia bisa masuk ke BPS Aceh Timur, maka saya buat rekomendasi bahwa ia dia bekerja selama 5 tahun 10 bulan di BPS Aceh Timur," pungkasnya.
(Serambinews.com/Agus Ramadhan)